

ANALISIS BANTUAN PINJAMAN LANGSUNG MASYARAKAT (BPLM) : Kasus Pengembangan Usaha Ternak Sapi di Provinsi Sulawesi selatan

Edi Basuno dan Rita Nur Suhaeti

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161*

ABSTRACT

This article is aimed at the identification performance of beef cattle rearing groups involve in community direct subsidy (CDS) program in South Sulawesi Province. Some farmer groups were prospective to progress, while some others faced difficulties. CDS distribution has been widely known and the community as well as the stakeholders welcomed the program and showed their enthusiasm. In general, technical aspects of cattle rearing have been well practiced by the group members and the development of a group is closely related to the quality of its human resource. There was a tendency that the more innovative the groups, the bigger the benefits they could enjoy. These benefits were also related to an improved human resource quality creating much better ideas in assurance of program continuity. There are some variations in CDS implementation due to positive impact of regional autonomy. Nevertheless, a continuous monitoring and evaluation is required to make sure the achievement of CDS objectives. Although almost all the observed groups confirmed capital shortage as the main constraint, however, some of them deposited their cash in the bank. Technology applications need to be prioritized by the implementing agencies, so that added value of beef cattle rearing would be increased. In this context, there should be training programs designed for local cadres through learning by doing approaches. The weakest point in the CDS program was the lack of facilitators, who are capable in implementing training to empower the groups. Prior to the subsidy distribution, group preparation process should be well conducted and at the same time should also be accommodate the groups' needs through participative dialogue. A revised pattern of group selection is required for appropriate selection. In addition, CDS program should not only subsidize the community, but also pay attention to its future management.

Key words: *agricultural development, community direct subsidy (CDS), beef cattle, South Sulawesi*

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan hasil identifikasi kinerja kelompok peternak penerima program Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Barru, Bantaeng, Sinjai. Beberapa kelompok cukup mempunyai prospek untuk berkembang, sedangkan kelompok lainnya tampak sulit berkembang. Distribusi BPLM dengan jangkauan yang cukup luas, disambut dengan antusias oleh semua pihak. Secara umum, aspek teknis budidaya pemeliharaan sapi sudah dikuasai dengan baik oleh anggota kelompok. Perkembangan suatu kelompok erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Terdapat kecenderungan bahwa anggota yang lebih maju dan

inovatif memperoleh manfaat yang lebih besar dari program BPLM tsb. Hal ini disebabkan oleh kualitas SDM mereka yang relatif lebih baik dibanding dengan anggota lainnya, sehingga mereka umumnya mempunyai prakarsa yang lebih baik. Terdapat variasi dalam pelaksanaan BPLM di tingkat daerah, sebagai dampak positif dari otonomi daerah. Namun demikian diperlukan monitoring dan evaluasi terus menerus agar tujuan program tercapai. Meskipun hampir semua kelompok menyatakan bahwa modal sebagai kendala utama, tetapi beberapa kelompok justru menyimpan dana kelompok di bank. Aplikasi berbagai teknologi, perlu mendapat prioritas dari pelaksana BPLM, agar nilai tambah usaha ternak sapi meningkat. Konsekuensinya adalah adanya program pelatihan kader lokal melalui kegiatan yang bersifat *learning by doing*. Program BPLM semestinya memiliki tim fasilitator sendiri yang mampu melatih pelaksana BPLM di daerah dalam penguatan kelompok. Aspek ini merupakan aspek terlemah yang ditemukan dalam program BPLM. Ditemukan perbedaan pengertian tentang sistem pengembalian antara kelompok dengan Dinas Peternakan, sehingga sebelum distribusi bantuan dimulai, penyiapan kelompok perlu lebih matang, sekaligus mengakomodasi kebutuhan kelompok melalui dialog yang partisipatif. Pola seleksi kelompok secara transparan perlu dikembangkan agar kelompok yang terpilih betul-betul kelompok yang siap melaksanakan program BPLM. Perlu ditambahkan bahwa program BPLM tidak hanya sekedar memberi bantuan kepada masyarakat, tetapi termasuk manajemen tindak lanjutnya.

Kata kunci : *pembangunan pertanian, sapi potong, bantuan pinjaman langsung masyarakat (BPLM), Sulawesi Selatan*

PENDAHULUAN

Sesudah mengalami krisis moneter yang berlanjut dengan krisis multi-dimensi (ekonomi, sosial dan politik) pada akhir tahun 1990-an dan sempat meningkatkan jumlah penduduk kurang sejahtera dari 22,5 juta jiwa pada tahun 1996 menjadi 37,3 juta jiwa pada tahun 2003, tampaknya Indonesia sudah bangkit kembali. Secara garis besar, negeri ini telah pulih dari krisis ekonomi dan belum lama ini Indonesia telah berhasil kembali menjadi salah satu negara berkembang berpenghasilan menengah. Angka kemiskinan yang meningkat lebih dari sepertiga kali selama masa krisis telah kembali pada kondisi sebelum krisis (Bank Dunia, 2006). Lebih lanjut, menurut Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari US\$ 2/ hari hampir sama dengan jumlah total penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari US\$ 2/hari dari semua negara di kawasan Asia Timur, kecuali Cina.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan, Indonesia telah merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 yang mengacu pada Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Walaupun angka kemiskinan nasional mendekati kondisi sebelum krisis, hal ini tetap berarti bahwa sekitar 40 juta orang saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Proporsi penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari US\$ 2/hari sama dengan negara-negara berpenghasilan rendah di kawasan ini, misalnya Vietnam.

Saat terjadi krisis dan selama pascakrisis terbukti bahwa sektor pertanian tetap tumbuh positif dan ternyata mampu bertahan pada masa krisis. Namun demikian dalam perkembangannya menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kontribusi relatif sektor pertanian terhadap PDB pada masa sebelum krisis (Makmun dan Yasin, 2003). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ini seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemerintah. Menurut Soekartawi (1995), keadaan ini merupakan salah satu ciri transformasi struktural yang telah terjadi pada perekonomian Indonesia di mana peran relatif sektor pertanian dan sumbangannya pada PDB serta penyerapan tenaga kerja semakin menurun.

Demikian pula subsektor peternakan, selama ini telah memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap pembangunan pertanian. Subsektor peternakan berperan dalam menyediakan bahan pangan sumber protein hewani, bahan baku industri dan menyediakan lapangan pekerjaan. Namun perkembangan subsektor peternakan belum didukung secara optimal oleh sektor perbankan dalam penyediaan kredit untuk modal usaha peternakan skala kecil (peternakan rakyat).

Bagi peternak skala kecil, aspek permodalan selalu menjadi kendala utama dalam mengembangkan usahanya. Peternak menghadapi kesulitan dalam memperoleh kredit karena berbagai sebab, diantaranya manajemen usaha relatif lemah, skala usaha relatif kecil dan aspek pemasaran kurang mendukung. Kondisi ini berdampak pada pengelolaan usaha yang kurang efisien sehingga pihak bank tidak mau mengambil risiko menyalurkan kredit kepada peternak. Dengan kata lain para peternak skala kecil belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal.

Penguatan modal kelompok melalui pola Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) merupakan salah satu upaya memberdayakan peternak dengan menggunakan pendekatan usaha kelompok. Bantuan semacam ini hanya sebagai motivasi bagi peternak agar mampu meningkatkan skala usaha secara lebih efisien, sehingga dapat memperbaiki tingkat pendapatan mereka. Pada akhirnya, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan.

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui: (1) perkembangan usaha kelompok baik dari segi usaha maupun dari aspek finansial kelompok usaha; (2) produktivitas usaha kelompok penerima bantuan pinjaman langsung masyarakat; (3) untuk mengetahui sistem perguliran yang dilakukan oleh kelompok usaha atau gabungan kelompok usaha BPLM; (4) tingkat pemupukan modal pada usaha kelompok penerima BPLM; (5) berbagai aspek teknis, kelembagaan dan usaha yang dilakukan kelompok; dan (6) usaha-usaha pemberdayaan kelompok yang dilakukan sehingga diketahui kinerja kelompok (kelas dan keberhasilannya). Untuk maksud tersebut, telah dilakukan kunjungan ke beberapa kelompok di tiga kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Bantaeng, Barru dan Sinjai.

BPLM di Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah dana BPLM pada tahun 2001 di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rp. 2,8 milyar. Jumlah ini merupakan jumlah terbesar dibandingkan dengan tahun 2000, 2002 dan 2003 sebesar Rp. 1,2 milyar, Rp. 1,3 milyar dan Rp. 1,8 milyar (Direktorat Pengembangan Peternakan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, Departemen Pertanian, 2003). Dari masing-masing kelompok yang dikunjungi, dipelajari aspek kelebagaannya, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan kelompok, antara lain administrasi, organisasi, pemupukan modal, diversifikasi usaha, kerjasama dengan institusi lain dan aplikasi teknologi peternakan. Dengan mengetahui tingkat kelembagaan suatu kelompok, kemudian dapat ditentukan kelas kelompok tersebut.

Dalam pelaksanaannya, program BPLM dilakukan oleh jajaran Dinas Peternakan di tingkat provinsi dan kabupaten, sedang di tingkat kecamatan di bawah koordinasi penyuluh. Dari aspek jumlah anggota, kelompok Kasimburan, Bina Baru dan Maworong terjadi peningkatan. Hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa perkembangan ke tiga kelompok tersebut cukup baik. Selain itu, dana untuk perguliran di ketiga kelompok tersebut juga telah tersedia, walaupun belum mencukupi. Sebaliknya, kelompok Tamaceddung mengalami berbagai kendala, antara lain habisnya simpanan kelompok sebagai akibat langsung dari pejabat ketua kelompok yang kurang berpengalaman. Tabel 1 berikut ini menyajikan karakteristik kelompok terpilih di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 1. Karakteristik Kelompok Terpilih di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Nama Kelompok	Tahun BPLM	Lokasi	Jumlah Anggota (orang)
1.	Kasimburan	2000	Desa Tanahloe, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng	Meningkat dari 30 menjadi 41 orang
2.	Bina Baru	2001	Desa Bajiminasa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng	Meningkat dari 10 menjadi 14 orang
3.	Tamaceddung	2001	Desa Pattalasang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai	Awal 25 akhir 25 orang (tetap)
4.	Maworong	2001	Dusun Maworong Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanate Riaja, Kabupaten Barru	Meningkat dari 30 menjadi 32 orang

Sumber: Data primer

Variasi Kelompok BPLM

Bantuan BPLM di Kabupaten Bantaeng ternyata paling besar dan dari tahun 2000 sampai 2003 selalu memperoleh BPLM, sedang kabupaten lainnya tidak setiap tahun memperoleh bantuan. Aspek peternakan ditangani oleh Subdin Peternakan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (PPK) dengan target ingin

“memberdayakan SDM peternakan, perikanan dan kelautan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi, baik di pasar domestik maupun global” (Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng, 2004). Dua kelompok BPLM, masing-masing Kasimburaan di Desa Tanahloe, Kecamatan Tompobulu dan Bina Baru di Desa Bajiminasa, Kecamatan Pa’jukukang, dikunjungi untuk dipelajari.

Kisaran umur anggota kelompok Kasimburaan antara 25-45 tahun dan 60 persen di antaranya hanya tamatan sekolah dasar atau buta huruf, sedang pendidikan tertinggi anggota adalah SLTA. Masing-masing anggota menerima bantuan 3 ekor sapi, 2 ekor betina (harga Rp 2 juta/ekor) dan 1 ekor jantan (harga Rp 2,5 juta/ekor). Sapi tidak dikandangkan di kandang kelompok, karena sempitnya lahan. Terdapat 32 unit kandang yang terpisah, 2 unit pengolahan pakan ternak dan 20 kandang jepit. Sapi dilepas di padang/lahan pertanian pada siang hari dan mengandangkannya pada malam hari. Kelompok mempunyai dua model pemeliharaan ternak, yakni pembibitan dan penggemukan. Khusus untuk penggemukan, ketika peternak menjual ternaknya, mereka diharuskan mengisi kas kelompok, yang besarnya antara 2-3 persen dari hasil keuntungan. Namun, hanya 25 persen penjualan ternak yang dilaporkan kepada pengurus, sedangkan pengurus kelompok belum melakukan penertiban.

Kelompok didampingi petugas IB yang juga berperan sebagai pendamping kelompok. Dinas Peternakan juga telah berinisiatif melaksanakan berbagai pelatihan teknis peternakan, misalnya fermentasi jerami dan pembuatan UMB, kesehatan hewan dan reproduksi ternak. Dari total jumlah anggota, 10 orang di antaranya masih tetap mengolah jerami dan memakai UMB. Bahan baku yang sulit diperoleh di lokasi menjadi kendala utama bagi peternak. Meskipun anggota kelompok pada umumnya telah mengetahui cara-cara pemberian pakan yang lebih baik, mereka masih menggunakan rumput dan jerami sebagai pakan pokok.

Kelompok Bina Baru mula-mula adalah kelompok tani yang dibentuk pada tahun 1993. Dari jumlah anggota 27 orang, 10 orang di antaranya dipilih menjadi anggota kelompok BPLM. Jumlah anggota ini kemudian meningkat menjadi 14 orang. Jumlah total bantuan dari BPLM sebesar Rp 105 juta, sebagian besar dibelikan sapi. Selain itu, dana juga digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, seperti modal simpan pinjam, membeli kontainer untuk menyimpan sperma beku, biaya berbagai pelatihan kelompok, pembuatan dua unit kandang, membeli obat-obatan dan sebagainya. Masing-masing anggota menerima pinjaman senilai harga seekor sapi, yaitu Rp 3,5 juta. Model pemeliharaannya adalah kombinasi antara pembibitan dan penggemukan. Satu hal yang membedakan kelompok Bina Baru dengan kelompok lainnya adalah adanya keharusan anggota untuk menanam rumput gajah sebelum menerima pinjaman BPLM. Selain menggunakan rumput gajah, mereka juga telah menggunakan dedak dan UMB untuk pakan ternak, sedang kawin suntik juga telah dilaksanakan oleh petugas IB.

Kabupaten Sinjai terletak di pantai timur bagian selatan jazirah Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 223 km dari Makassar. Meskipun wilayahnya 85 persen berbukit, bergelombang sampai bergunung, namun data tahun 2001 menunjukkan sektor pertanian cukup berperan, yakni mencapai 68,13 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, 2002a). Kecamatan contoh adalah Sinjai Timur, dengan populasi sapi 2.797 ekor terdiri dari 1.119 ekor jantan dan 1.678 betina (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, 2002b) dan kelompok penerima BPLM yang dikunjungi adalah kelompok Tamaceddung yang terletak di Desa Pattalassang.

Kelompok Tamaceddung yang berdiri sejak tahun 1988, pada tahun 2001 menjadi kelompok BPLM. Dari jumlah anggota sebanyak 25 orang, 6 di antaranya belum pernah memelihara sapi. Fokus kegiatan kelompok adalah penggemukan, dengan total sapi dari BPLM 52 ekor. Masing-masing anggota menerima sapi bakalan 2 ekor dengan harga Rp. 2,5 juta/ekor, kecuali ketua dan sekretaris yang menerima masing-masing 3 ekor sapi. Pihak Dinas Peternakan tidak memungut bunga pinjaman dari para anggota (gratis), demikian pula, tidak diberlakukan sistem perguliran. Peternak umumnya menjual ternak setiap 2 atau 3 bulan, tetapi ada juga yang menjual setiap saat. Sebagai ilustrasi, seorang petani yang dalam waktu 18 bulan telah melakukan jual beli ternak sebanyak 5 kali. Keuntungan total dari 5 kali transaksi tsb. Rp 625.000, berarti dalam 1 bulan, rata-rata petani tersebut memperoleh keuntungan Rp 125.000. Frekuensi penjualan yang relatif cepat ini mengindikasikan ada desakan kebutuhan uang kontan bagi anggota. Kelompok mempunyai peraturan, bagi anggota yang menjual ternak diwajibkan untuk menyimpan uang antara Rp 25 s/d 50 ribu sebagai modal usaha simpan pinjam kelompok.

Pertemuan anggota yang dilakukan 2 kali sebulan dengan kehadiran 80 persen, selalu terkait dengan kunjungan Dinas Peternakan Kabupaten dalam rangka pembinaan kelompok dalam aspek teknis peternakan. Dalam pertemuan, anggota belum terlibat di dalam pengambilan keputusan, artinya dominasi pengurus masih kuat. Di samping itu, anggota belum memahami pentingnya administrasi, sehingga meskipun jumlah buku kelompok cukup lengkap, jarang anggota yang menanyakan mengenai isi buku-buku tersebut. Pasca meninggalnya ketua, kelompok mengalami berbagai kesulitan untuk berkembang. Pejabat ketua kelompok tidak mampu mengelola simpan pinjam dengan baik. Kinerja kelompok seperti ini sulit untuk dijadikan sumber kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini membuat pihak Dinas Peternakan kurang percaya bahwa anggota mampu mengembalikan pinjaman pada waktunya.

Kabupaten Barru terletak di pantai Barat Sulawesi dan berjarak sekitar 100 km dari Makassar. Kabupaten ini mempunyai kelebihan dalam hal transportasi, karena memiliki dua jalur perhubungan, yaitu darat dan laut. Di kabupaten ini kontribusi sektor pertanian pada tahun 2002 cukup tinggi, yaitu mencapai 50,52 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, 2003). Kecamatan terpilih adalah Tanete Riaja yang pada tahun 2002 populasi sapi

sebanyak 18.117 ekor, lebih dari setengah populasi sapi di Kabupaten Barru yang jumlahnya 33.246 ekor. Pola budidaya ternak umumnya masih tradisional, sedangkan pasar potensial untuk sapi dari kabupaten ini adalah Makassar dan Kalimantan Timur (Dinas Peternakan Kabupaten Barru, 2004a). Di kecamatan ini, Kelompok Maworong adalah penerima BPLM tahun 2001 dengan jumlah dana Rp 300 juta.

Kelompok Waworong mempunyai anggota dengan kisaran umur antara 26 s/d 65 tahun, tingkat pendidikan rata-rata SMP dan jumlah anak rata-rata 4 orang/keluarga. Dari total 30 orang anggota, 15 orang di antaranya belum pernah memiliki sapi, sisanya memiliki 1-2 ekor, sehingga BPLM telah menjadikan orang yang tidak mempunyai sapi menjadi memiliki sapi sendiri dan dari mempunyai 1-2 ekor sapi menjadi mempunyai lebih banyak sapi. Besarnya jumlah pinjaman anggota tergantung dari kesanggupannya untuk membayar. Beberapa anggota bahkan meminjam sampai Rp 10 juta, untuk membeli beberapa ekor sapi. Besarnya bunga pinjaman 2,5 persen/tahun dan keuntungan untuk setiap kali penjualan rata-rata Rp 600.000/ekor. Sapi dipelihara selama 6 bulan, sehingga dalam 1 tahun terjadi 2 kali pembelian dan penjualan. Anggota diperbolehkan membeli sapi sendiri menurut pilihannya, baik di pasar maupun di desa.

Berbagai teknologi sudah diaplikasikan, antara lain fermentasi jerami, penggunaan pakan tambahan berupa dedak dan pengolahan kompos. Penjualan sapi masih dilakukan secara individu, belum difasilitasi oleh kelompok. Inisiatif untuk menjual sapi secara berkelompok memerlukan upaya khusus, karena terkait dengan berbagai kepentingan, misalnya beberapa anggota juga berprofesi sebagai pedagang sapi. Pinjaman melalui BPLM dirasakan manfaatnya bagi anggota, terbukti mereka mampu membangun masjid, menjalankan kegiatan simpan pinjam dengan lancar dan memiliki perencanaan usaha kelompok.

ASPEK TEKNIS DALAM USAHA KELOMPOK

Perlu diketahui bahwa program BPLM tidak hanya mengalokasikan ternak, tetapi juga melengkapi dengan hal-hal yang sifatnya menunjang, seperti vaksinasi, inseminasi buatan, pemberian pakan tambahan, perkandangan, penyediaan hijauan pakan ternak, pengolahan limbah dan sebagainya. Masing-masing Dinas Peternakan sudah mempunyai paket khusus untuk melengkapi program BPLM ini. Di lokasi, pelaksana fasilitasi adalah petugas peternakan, seperti PPL, petugas kesehatan hewan (keswan) dan inseminator. Mereka ini secara khusus ditugaskan sebagai pendamping kelompok BPLM tersebut. Pada kelompok yang spesialisasi pada pembibitan, teknologi pakan dan inseminasi buatan menjadi prioritas, sedangkan pada usaha penggemukan, teknologi pakan menjadi prioritas. Pada ke dua sistem pemeliharaan tersebut teknologi pengolahan limbah juga menjadi prioritas, bahkan di beberapa kelompok sudah sempat menjual kompos.

Tabel 2 menyajikan kinerja kelompok dalam mengaplikasikan teknologi yang secara langsung berkaitan dengan usaha pemeliharaan sapi. Teknologi pra-produksi meliputi persiapan pemberian pakan seperti pemakaian jenis rumput unggul serta penyusunan ransum, fermentasi jerami dan sebagainya. Teknologi yang berkaitan dengan budidaya antara lain vaksinasi, inseminasi buatan, pemberian pakan tambahan, vitamin dan lain-lain. Teknologi pascapanen meliputi pengolahan limbah menjadi pupuk kompos. Di masa mendatang aplikasi berbagai teknologi seperti tersebut di atas perlu mendapat prioritas dari pihak Dinas Peternakan agar nilai tambah usaha pemeliharaan sapi meningkat. Peningkatan ini dapat digunakan sebagai modal untuk diversifikasi usaha, baik tetap di subsektor peternakan maupun kegiatan lainnya. Pada prinsipnya dinas cukup menyediakan materi yang tidak dapat diusahakan oleh masyarakat, seperti vaksin, limbah tetes tebu, semen beku dan nitrogen cair berikut alat penyimpanannya.

Tabel 2. Penerapan Teknologi pada Kelompok Penerima BPLM di Provinsi Sulawesi Selatan, 2004

No.	Nama kelompok	Jenis teknologi			Pascapanen dan pemasaran
		Praproduksi	Budidaya	Pasca panen	
1.	Kasimburan	belum	sudah	belum	Belum
2.	Bina Baru	belum	sudah	belum	Belum
3.	Tamaceddung	belum	belum	belum	Belum
4.	Maworong	sudah	sudah	belum	Belum

Sumber: Data Primer

Terlepas dari masalah teknis, tetapi cukup penting adalah perlu ada upaya serius untuk memberikan kepercayaan kepada kader lokal sebagai patner petugas dinas. Hanya dengan cara demikian proses kemandirian secara perlahan dapat diwujudkan. Konsekuensi dari hal-hal tersebut di atas adalah program pelatihan kader lokal secara optimal melalui kegiatan yang sifatnya *learning by doing*. Namun patut disayangkan bahwa pihak Dinas secara terprogram belum mengantisipasi masalah kaderisasi ini yang nantinya mampu menggantikan peran petugas peternakan. Dengan terbatasnya jumlah petugas Dinas Peternakan, pengkaderan merupakan hal penting yang harus dilaksanakan dalam program BPLM, agar terwujud suatu kemandirian berkelanjutan.

KELEMBAGAAN KELOMPOK

Beberapa hal yang dikaji untuk mengetahui siap atau tidaknya suatu kelompok untuk mandiri, antara lain partisipasi anggotanya, proses pengambilan keputusan di tingkat kelompok, kerja sama di antara anggota kelompok dan tingkat keaktifan pengurusnya. Kinerja ini dibedakan dengan memberikan predikat

kurang, sedang dan baik, semata-mata untuk menunjukkan indikasi yang terjadi pada kelompok BPLM. Salah satu hal yang membuat kelompok maju adalah ketepatan dan intensitas pembinaan terhadap kelompok tersebut. Secara umum dapat diamati bahwa pembinaan yang mengarah pada kemandirian kelompok belum terlihat jelas. Demikian pula, aspek penguatan kelompok melalui pemberdayaan anggota kelompok belum secara optimal diperhatikan. Pada Tabel 3 berikut ini diberikan rincian deskripsi kelompok.

Kelompok Kasimbunan maju dalam hal pengambilan keputusan bersama, sedang Kelompok Bina Baru maju dalam aspek pengambilan keputusan dan kerja sama diantara anggota. Kontras dengan kedua kelompok tersebut, kelompok Tamaceddung menunjukkan banyak kekurangan. Misalnya, belum ada kegiatan secara berkelompok, demikian pula partisipasi anggota juga rendah. Kelompok yang ditinggal ketuanya ini ternyata meninggalkan kepengurusan yang tidak aktif, sehingga sulit mengharapkan kelompok bisa berkembang. Namun demikian tingkat kewirausahaan anggota sebenarnya cukup menonjol, terbukti dari tingginya jual beli sapi. Orientasi pada keuntungan yang tinggi ini sebenarnya dapat direspon oleh kelompok dengan cara menjual dan membeli sapi secara bersama-sama.

Kelompok Maworong di lain pihak merupakan kelompok yang relatif maju dalam hal kepengurusan dan memiliki tujuan kelompok yang jelas. Misalnya, kelompok ini secara berkala telah melakukan pertemuan yang dijadwalkan sebulan sekali, dengan tingkat kehadiran anggota sekitar 80 persen, sedang bagi pengurus kelompok, pertemuan diadakan minimal 2 kali sebulan. Bagi anggota yang tidak hadir dikenakan sanksi dengan cara dipotong SHU pada akhir tahun. Rapat kelompok telah berjalan dua arah, artinya, telah terjadi partisipasi anggota secara aktif, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Tabel 3. Karakteristik Kelembagaan Kelompok BPLM di Sulawesi Selatan, 2004

Kabupaten	Kelompok	Karakteristik Kelembagaan			
		Partisipasi Anggota	Pengambilan Keputusan	Kerja Sama Kelompok	Keaktifan Kepengurusan
Bantaeng	Kasimbunan	Sedang	Cukup	Sedang	Cukup
	Bina Baru	Sedang	Cukup	Cukup	Cukup
Sinjai	Tamaceddung	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
Barru	Maworong	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup

SISTIM DAN MEKANISME PERGULIRAN PINJAMAN

Sistim dan mekanisme perguliran cukup bervariasi antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Hal ini merupakan cerminan nuansa otonomi daerah,

sehingga masing-masing daerah mempunyai penafsiran yang berbeda tentang BPLM itu sendiri. Secara ringkas Tabel 4. menyajikan sistim dan mekanisme perguliran kelompok BPLM.

Tabel 4. Sistem dan Mekanisme Perguliran Kelompok BPLM di Sulawesi Selatan, 2004

Kabupaten	Nama Kelompok	Sistem dan Mekanisme Perguliran
Bantaeng	Kasimburan, 2000	Tidak ada perguliran, hanya mengembalikan uang tanpa bunga kepada Dinas Peternakan.
Bantaeng	Bina Baru, 2001	Tidak ada perguliran, hanya mengembalikan uang tanpa bunga kepada Dinas Peternakan.
Sinjai	Tamaceddung, 2001	Tidak ada perguliran, tidak ada bunga, waktu pengembalian selama tiga tahun.
Barru	Maworong, 2001	Ada perguliran. Besar pinjaman tidak sama tergantung kesanggupan, lama pinjaman lima tahun dengan bunga 5%/th dibayarkan setiap bulan Desember

Secara keseluruhan, sistem dan mekanisme perguliran yang dilakukan belum sesuai dengan harapan BPLM. Dari empat kelompok, hanya satu yang melakukan perguliran, yaitu Kelompok Maworong. Ternyata sistem dan mekanisme perguliran yang berlaku di kelompok BPLM di Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya mengacu pada pedoman BPLM pusat. Misalnya, yang digulirkan masih terbatas pada ternak, tanpa disertai komponen pendukung seperti kandang, paket pakan tambahan, peralatan IB dan obat-obatan. Tampaknya pedoman yang telah disiapkan belum secara penuh dapat dilaksanakan di lokasi. Pada umumnya, kelompok enggan untuk menyerahkan aset selain ternak untuk digulirkan. Hal ini mungkin dapat dikaitkan dengan relatif belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan pada tahap persiapan dan pada awal dimulainya kegiatan.

PERKEMBANGAN KELOMPOK

Substansi pelaksanaan BPLM adalah untuk membantu masyarakat yang relatif kurang beruntung di pedesaan. Berbagai bentuk bantuan, baik yang berupa ternak maupun uang dimaksudkan pada akhirnya dapat mengangkat kesejahteraan penerima bantuan tersebut. Dengan demikian, akhirnya bantuan BPLM mampu mempengaruhi secara positif kegiatan produktif masyarakat apapun bentuknya, dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat. Diasumsikan pemberian bantuan yang diikuti dengan pembinaan intensif dari para petugas akan mampu memberi dorongan bagi kelompok penerima bantuan dalam berusaha. Oleh karena

itu, diversifikasi usaha, dari ternak ke usaha lain, dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan dari program BPLM.

Kelompok Kasimbunan sebenarnya cukup prospektif untuk berkembang, tetapi selama ini pendampingan yang dilakukan petugas masih bersifat sektoral, sehingga kegiatan yang dilakukan kelompok masih terbatas pada usaha memelihara sapi. Wawasan untuk mengembangkan usaha lain di tingkat kelompok melalui modal yang dipupuk kelompok dari memelihara sapi belum terwujud. Kepengurusan kelompok belum optimal, masih terkesan ragu-ragu untuk melangkah ke usaha-usaha lain yang sebenarnya dapat dikembangkan kelompok. Aset kelompok sebesar Rp 35 juta justru disimpan di deposito, sehingga optimalisasi kegiatan kelompok belum tercapai. Namun demikian, kelompok sudah merencanakan jual beli jagung dan kakao, di samping mengembangkan usaha penggemukan sapi. Keinginan kelompok untuk membentuk koperasi cukup mengherankan karena masih rendahnya kerja sama di dalam kelompok. Sebagian besar anggota masih bergantung pada pengurus, atau lebih tepatnya ketua kelompok. Dengan kata lain, pemberdayaan terhadap anggota relatif masih terbatas.

Kelompok Bina Baru mampu meningkatkan modal kelompok dan pendapatan anggota dari usaha simpan pinjam. Di samping itu, kelompok juga memiliki usaha yang berkaitan dengan penyediaan saprotan melalui kerja sama dengan KUD setempat. Kelompok berencana mendirikan kios saprotan, agar anggota dan masyarakat setempat tidak perlu ke kota untuk membeli saprotan. Kelompok juga telah berhasil mengarahkan anggotanya untuk mempunyai kebun rumput, sehingga ketersediaan pakan terjamin. Dengan anggota yang relatif kecil, yaitu 10 orang, maka kelompok ini relatif mudah dikembangkan, meskipun pengaruh kegiatan kelompok terhadap masyarakat sekitarnya belum signifikan. Peningkatan jumlah sapi yang dipelihara belum mengalami kenaikan karena kemampuan kelompok untuk memberi pinjaman kepada anggota masih relatif terbatas.

Simpan pinjam di kelompok Bina Baru dengan modal awal Rp 20 juta berjalan lancar. Anggota meminjam uang untuk membeli sapi bakalan dan setelah dipelihara 3 sampai 4 bulan kemudian dijual. Keuntungan dibagi sama besar antara kelompok dan peminjam. Dengan cara demikian terjadi peningkatan dana simpan pinjam kelompok. Di samping itu, bank sudah tidak asing lagi bagi kelompok, terbukti kelompok telah menyimpan uangnya di BRI. Di masa depan, kelompok berencana membangun kios saprotan agar harga saprotan menjadi lebih murah. Perkembangan kelompok di masa depan tampak cerah, terutama karena kelompok mempunyai modal usaha yang cukup signifikan untuk diputar di antara anggota kelompok serta untuk modal usaha yang baru.

Kelompok Tammacedung kondisinya cukup memprihatinkan, belum sampai pada tahapan peningkatan kinerja kelompok. Peningkatan modal belum dapat diwujudkan, sedangkan rata-rata pemilikan sapi anggota belum meningkat.

Usaha secara berkelompok juga belum muncul, sehingga anggota masih bekerja secara individu, meskipun terdaftar dalam kelompok. Simpanan anggota tidak berkembang, tetapi sebaliknya justru habis tidak tersisa, karena kontrol dalam pengambilan simpanan relatif lemah. Target kelompok semata-mata hanya mengembalikan pinjaman dari Dinas Peternakan. Namun demikian, seorang anggota yang merangkap sebagai pedagang ternak relatif cukup berhasil dalam usaha penggemukan, sehingga mampu membeli motor. Dalam kondisi seperti diatas, kelompok belum mampu mempengaruhi masyarakat sekitar, sebaliknya anggota kelompok tetap melakukan praktek memelihara sapi seperti masyarakat pada umumnya.

Kelompok Maworong merupakan kelompok yang mempunyai prospek untuk maju. Hal ini dapat terlihat dari kapasitas sekretaris kelompok yang mampu merinci sejarah, profil, rencana ke depan dan kendala yang dihadapi kelompok. Kepengurusan yang sebagian besar dipegang oleh orang muda sangat mewarnai keinginan kelompok untuk maju. Kelompok telah mampu meningkatkan modal kelompok, baik melalui sumbangan anggota kelompok ketika menjual sapi maupun dari hasil simpan pinjam. Demikian pula, anggota merasa memperoleh peningkatan pendapatan dan skala pemilikannya bertambah. Kinerja kelompok ditunjukkan dengan adanya kerja sama dengan KUD dalam penyediaan saprodi.

Kelompok membeli saprodi dari KUD dalam jumlah besar, khususnya pupuk dan obat, dengan membayar dalam jangka 6 bulan. Untuk itu, petani membayar ekstra ke KUD sebesar Rp 4.200/petani/6 bulan, dan bagi anggota yang tidak rajin membayar angsuran, bunganya dinaikkan menjadi Rp 6.000/6 bulan. Di samping bekerja sama dengan KUD, kelompok juga mengelola simpan pinjam antaranggota dengan modal awal Rp 1 juta. Dari total 30 orang anggota, 12 orang di antaranya menggunakan fasilitas simpan pinjam tersebut dan bunga yang dikenakan sebesar 2,5 persen/6 bulan. Pada akhir tahun pertama, uang tersebut telah menjadi Rp 3 juta, akhir tahun ke dua menjadi Rp 7 juta dan pada akhir tahun ke tiga telah menjadi Rp 11 juta. Uang tersebut digunakan untuk melaksanakan rencana kelompok, seperti pompanisasi untuk mencari air, karena setiap musim kemarau kelompok mengalami kesulitan air. Dengan pompanisasi, dapat meningkatkan indeks tanam, sehingga pendapatan anggota meningkat. Kelompok memiliki rencana untuk meningkatkan usahanya dengan menanam cabai dan sayuran lainnya, meskipun air telah diidentifikasi sebagai kendala utama. Untuk itu, kelompok telah merencanakan mengusahakan air dengan pompanisasi dan dialirkan sampai ke desa menggunakan pipa paralon.

KELAS KELOMPOK

Kelas kelompok ditentukan menurut panduan yang digunakan Proyek Pengembangan Usaha Ternak di Kawasan Timur Indonesia (PUTKATI),

Direktorat Jenderal Peternakan (2004), dalam menilai kemajuan kelompok. Penilaian tersebut didasarkan atas enam kategori, yakni (1) administrasi, (2) perencanaan, (3) organisasi/kelembagaan, (4) pemupukan modal, (5) hubungan kelembagaan dan (6) teknologi. Masing-masing kategori mempunyai beberapa kriteria yang masing-masing di nilai (Lampiran 1). Jumlah nilai dari setiap kategori merupakan nilai kelompok yang bersangkutan. Berdasarkan nilai tersebut, kelompok dibedakan menjadi empat kelas, yakni pemula (< 400), lanjut (400 – 600), madya (601 – 800) dan mandiri (801 – 1.000). Tabel 5 menyajikan nilai masing-masing kelompok contoh di Sulawesi Selatan. Dari empat kelompok, dua di antaranya termasuk kelas pemula dan dua kelompok lainnya termasuk kelas lanjut.

Tabel 5. Nilai dan Kelas Kelompok BPLM di Sulawesi Selatan, 2004

No.	Nama kelompok	Nilai	Kelas kelompok
1.	Kasimburan	455	Lanjut
2.	Bina Baru	350	Pemula
3.	Tamaceddung	280	Pemula
4.	Maworong	545	Lanjut

Sumber: Data primer (diolah).

PENUTUP

Kinerja kelompok contoh relatif bervariasi. Beberapa kelompok cukup mempunyai prospek untuk berkembang, sedangkan lainnya dinilai sulit berkembang. Berkembangnya suatu kelompok erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kelompok tersebut, terutama pengurus kelompok. Kelompok dengan kualitas anggota yang memadai akan dapat berkembang, meskipun hanya menerima fasilitas yang relatif terbatas. Sebaliknya kelompok dengan kualitas SDM yang rendah, perlu diawali dengan program pemberdayaan, minimal agar para anggota mampu memahami pentingnya berkelompok. Dari keempat kelompok contoh, aspek penguatan kelompok menjadi kendala utama, sehingga belum mengarah untuk menjadi kelompok mandiri.

Distribusi BPLM disambut dengan antusias, baik oleh jajaran Dinas Peternakan setempat, maupun oleh penerima bantuan. Sistem distribusi bantuan dilakukan secara transparan dengan aturan pengembalian yang relatif mudah dan fleksibel. Hal ini memberikan motivasi tersendiri bagi masyarakat. Aspek teknis budidaya sudah dikuasai oleh penerima bantuan, baik dari aspek kesehatan hewan, pemberian pakan, reproduksi maupun sistem perkandungannya. Hal ini merupakan hasil pembinaan kelompok yang lebih fokus pada aspek teknis, tidak disertai dengan pembinaan yang mengarah pada peningkatan kapasitas anggota. Dijumpainya dana kelompok yang disimpan di bank dapat dijadikan sebagai

ilustrasi dalam hal peningkatan kapasitas ini. Sebenarnya, peningkatan kapasitas kelompok dapat diartikan sebagai jaminan keberlanjutan program BPLM. Adanya variasi dalam pelaksanaan BPLM dapat dipandang sebagai dampak positif dari semangat otonomi daerah, sekaligus juga sebagai kelemahan di dalam sosialisasi awal. Agar tujuan BPLM dapat tercapai diperlukan monitoring dan evaluasi program BPLM secara berkelanjutan. Padahal, untuk sebagian besar wilayah di Indonesia pemeliharaan sapi sebagai *entry point* suatu pengembangan masyarakat dinilai sangat tepat.

Perlu ada upaya serius untuk memberikan kepercayaan kepada kader lokal sebagai kepanjangan tangan petugas dinas. Untuk itu perlu program pelatihan kader lokal secara optimal melalui kegiatan yang sifatnya *learning by doing*. Di samping itu, program BPLM seharusnya mengadopsi *Training for Trainers* (TOT) bagi petugas Dinas agar mampu melatih pelaksana BPLM dalam aspek penguatan kelompok. Aspek ini merupakan aspek terlemah dari program BPLM. Menyusul penguatan kelompok, setiap kabupaten diharuskan memunculkan sejumlah kelompok, sebagai kelompok model, untuk selanjutnya menjadi acuan bagi kelompok lainnya. Kinerja kelompok ini dapat dilombakan di tingkat provinsi dan nasional sebagai salah satu upaya motivasi.

Pola seleksi kelompok secara transparan perlu dikembangkan agar kelompok yang terpilih betul-betul siap melaksanakan program BPLM. Sebelum dimulai distribusi bantuan, kelompok perlu disiapkan secara matang sekaligus mengakomodasi kebutuhan kelompok. Filosofinya, lebih baik membiayai masa persiapan yang lebih lama dengan jaminan keberlanjutan, dari pada memberi bantuan ke kelompok yang lemah kinerjanya dan berakhir dengan kegagalan. Seharusnya program BPLM tidak hanya sekedar memberi bantuan kepada kelompok, tetapi yang lebih penting menyediakan sistem manajemen secara utuh dan mengarah mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru. 2003. Kabupaten Barru dalam Angka, 2002. Barru.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru. 2003. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barru, 2002. Barru.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. 2002a. Kabupaten Sinjai dalam Angka, 2001. Sinjai.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. 2002b. Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dalam Angka, 2001. Sinjai.
- Bank Dunia, 2006, Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Ichtisar. The Bank World Bank Office, Jakarta. Website: www.worldbank.or.id

- Dinas Peternakan Kabupaten Barru. 2004a. Monografi Pengembangan Kawasan Agropolitan Peternakan. Barru.
- Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng. 2004. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng 2003. Bantaeng.
- Direktorat Pengembangan Peternakan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, Departemen Pertanian. 2003. Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) Berbasis Pemberdayaan Kelompok Peternak. Bahan Presentasi. Jakarta.
- Direktorat Pengembangan Peternakan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, Departemen Pertanian. 2004. Proyek Pengembangan Usaha Ternak di Kawasan Timur Indonesia (PUTKATI) - (*Community Development* dan *Capacity Building*). Laporan Akhir. Jakarta.
- Makmun dan Yasin. 2003 Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Sektor Pertanian. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7 (3) September.
- Soekartawi. 1995. Teori Ekonomi Produksi dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi Cobb-Douglas, PT Raja Grafindo, Jakarta,

Tabel Lampiran 1. Pedoman untuk Menilai Kelompok BLM (Status Kelompok: Pemula dan Lanjut)

Aspek kelompok	Status Kelompok tani			
	Pemula	Nilai	Lanjut	Nilai
1. Administrasi	Dikukuhkan kepala desa	10	Dikukuhkan camat	20
	Buku adm tidak lengkap < 4 buku	10	Buku adm tidak lengkap (5- 6 buku)	20
	Kantor sendiri belum ada	15	Ada kantor tetap	30
	Data usaha tani tidak ada	15	Data usaha tani lengkap dan rapi	30
		50		100
2. Perencanaan	Tidak ada rencana pengemb. skala usaha	15	Ada rencana pengemb. skala usaha	25
	Tidak ada rencana pengemb. jenis usaha	15	Ada rencana pengemb. jenis usaha	25
	Ada RDKK	30	Ada RDKK	30
		60		80
3. Organisasi/Kelembagaan	Pengurus dipilih 5 tahun sekali	40	Pengurus dipilih 3-4 tahun sekali	50
	Tidak ada jadwal pertemuan rutin	30	Ada jadwal pertemuan rutin (tiap 1-2 bulan)	40
	Absensi kehadiran anggota < 50%	30	Absensi kehadiran anggota 50 – 60 %	40
		100		130
4. Pemupukan modal	Ada rencana pengemb. sumber modal	20	Ada rencana pengemb. sumber modal (bank, koperasi dll)	30
	Modal usaha jarang meningkat	20	Modal usaha kelompok tidak selalu meningkat	30
	Ada peningkatan pendapatan kelompok < 1 juta rupiah	20	Ada peningkatan pendapatan kelompok < 1-3 juta rupiah	30
	Simpan pinjam belum aktif (< 50 % anggota aktif)	20	Simpan pinjam belum aktif (50 - 70 % anggota aktif)	40
		80		130
5. Hubungan Kelembagaan	Belum ada kerjasama dengan koperasi atau lembaga lain	30	Ada anggota kelompok yang jadi anggota koperasi atau lembaga lain	30
	Ada anggota yang jadi pengurus koperasi atau lembaga lain	30	Ada anggota kelompok yang jadi pengurus koperasi atau lembaga lain	30
		-	Ada kerjasama dengan koperasi	20
		60		80
6. Teknologi	Menerapkan teknologi budidaya	50	Menerapkan teknologi budidaya	40
	-	-	Menerapkan teknologi pasca panen	60
		50		100

Keterangan: nilai kelompok pemula < 400; lanjut 400 – 600; madya 601 – 800; mandiri 801 – 1000.

Tabel Lampiran 2. Pedoman untuk Menilai Kelompok BLM (Status Kelompok: Madya dan Mandiri)

Aspek kelompok	Status kelompok tani			
	Madya	Nilai	Mandiri	Nilai
1. Administrasi	Dikukuhkan bupati	20	Dikukuhkan gubernur	30
	Buku adm tidak lengkap 6-8 buku	20	Buku adm lengkap (> 8 buku)	30
	Ada kantor tetap, pinjam, sewa	30	Ada kantor tetap milik sendiri	20
	Data usaha tani lengkap, rapi	30	Data usaha tani lengkap dan sangat rapi	20
		100		100
2. Perencanaan	Ada rencana pengemb. skala usaha	30	Ada rencana pengemb. skala usaha	45
	Ada rencana pengemb. jenis usaha	30	Ada rencana pengemb. jenis usaha	45
	Ada RDKK	40	Ada RDKK	60
		100		150
3. Organisasi/Kelembagaan	Pengurus dipilih 2 tahun sekali	70	Pengurus dipilih tiap tahun	80
	Ada jadwal pertemuan rutin tiap bulan	50	Ada jadwal pertemuan rutin (2 kali per bulan)	60
	Absensi kehadiran anggota 60-70%	50	Absensi kehadiran anggota > 70 %	60
		170		200
4. Pemupukan modal	Ada rencana pengemb. sumber modal	40	Ada rencana pengemb. sumber modal (bank, koperasi dll)	50
	Modal usaha tidak selalu meningkat	40	Modal usaha kelompok selalu meningkat	50
	Ada peningkatan pendapatan kelompok 3-5 juta rupiah	40	Ada peningkatan pendapatan kelompok > 5 juta rupiah	50
	Simpan pinjam berjalan baik (70-80 % anggota aktif)	50	Simpan pinjam berjalan baik (70 - 80 % anggota aktif)	50
		170		200
5. Hubungan Kelembagaan	50 % anggota adalah anggota koperasi atau lembaga lain	25	100 % anggota kelompok adalah anggota koperasi atau lembaga lain	40
	Ada anggota yang jadi pengurus koperasi atau lembaga lain	25	Beberapa anggota kelompok jadi pengurus koperasi atau lembaga lain	40
	Siap memiliki koperasi	25	Memiliki koperasi	40
	Ada usaha lain yang belum dikoordinir dikoperasinya	25	Ada usaha lain di kopersinya	30
		100		150
6. Teknologi	Menerapkan teknologi pra produksi	50	Menerapkan teknologi pra produksi	60
	Menerapkan teknologi budidaya	50	Menerapkan teknologi budidaya	60
	Menerapkan teknologi pasca panen	60	Menerapkan teknologi pasca panen dan pemasaran	80
		160		200

Keterangan: nilai kelompok pemula < 400; lanjut 400 – 600; madya 601 – 800; mandiri 801 – 1000.